

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik sektarian Desa Kalikangkung memiliki dinamika konflik yang terdiri dari tahapan prakonflik, konfrontasi, krisis konflik, dan pascakonflik. Konflik sektarian memiliki intensitas dalam setiap tahapan dinamikanya. Intensitas mengalami kenaikan pada saat tahap prakonflik menuju tahap konfrontasi hingga akhirnya mencapai klimaks pada saat tahap krisis konflik. Dinamika konflik akhirnya mengalami penurunan pada saat menuju tahapan pascakonflik. Intensitas pascakonflik memiliki intensitas lebih tinggi daripada tahap prakonflik. Hal ini terjadi karena masyarakat masih menyimpan sentimen terhadap kelompok Ahmadiyah sehingga konflik serupa dapat terulang kembali. Konflik tersebut juga memiliki elemen kontradiksi, *attitude*, dan *behaviour* sehingga digolongkan ke dalam konflik yang hebat. Kontradiksi menyebabkan masyarakat memiliki prasangka, *attitude* mengakibatkan masyarakat bersikap diskriminatif, dan *behaviour* menciptakan perilaku kekerasan dan pemutusan komunikasi oleh masyarakat.

Konflik sektarian Desa Kalikangkung disebabkan karena adanya faktor umum (*underlying factors*) dan faktor pendukung atau (*precipitating factors*). Faktor umum berperan sebagai faktor yang menjadi akar masalah terjadinya konflik, sedangkan faktor pendukung berperan sebagai pematik konflik sehingga konflik yang terjadi mencapai klimaksnya. Faktor umum pada konflik Desa Kalikangkung yaitu penilaian

masyarakat terhadap sikap N sebagai masyarakat pendatang yang tertutup menjadikan banyak persepsi dari masyarakat terhadapnya salah satunya terkait dirinya yang merupakan seorang Ahmadiyah. Selanjutnya terdapat sentimen masyarakat terkait keberadaan kelompok Ahmadiyah karena kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sudah ditetapkan dalam peraturan sebagai sebuah kelompok aliran yang tidak boleh disebarkan dan dibicarakan atau dengan kata lain kelompok sesat. Faktor umum yang terakhir yaitu adanya dominasi kuat Nahdlatul Ulama dalam masyarakat sehingga menjadikan identitas sosial masyarakat Nahdlatul Ulama sangat kuat di Desa Kalikangkung. Hal ini menyebabkan favoritisme dan menimbulkan gesekan karena ketidaksamaan nilai dan tujuan dari kelompok dominasi tersebut. Sementara itu, faktor pendukung yang menyebabkan konflik mencapai klimaks berkaitan dengan tindakan N yang dianggap masyarakat tidak etis. Faktor pendukung tersebut ditambah dengan pernyataan HR terkait masjid yang akan dibangun merupakan masjid Muhammadiyah, tetapi dibantah langsung oleh pihak Muhammadiyah sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap N dan kelompoknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan faktor umum dan faktor pendukung saling berkaitan. Keberadaan faktor pendukung dalam konflik sektarian Desa Kalikangkung telah memantik faktor umum yang telah lama ada di tengah masyarakat.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat saran yang dapat dilakukan agar konflik serupa tidak dapat terulang lagi. Saran ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat konflik tanpa terkecuali. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu terkait komunikasi antar semua pihak. N dan masyarakat seharusnya menjalin komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan prasangka dan kesalahpahaman diantara kedua pihak. Rencana N untuk membangun masjid apabila dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat sekitar seharusnya dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh N, maka seharusnya N tidak perlu menghindar untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar.

Pemerintah sudah berperan aktif di dalam penyelesaian konflik. Namun, peran pemerintah dalam memberikan tempat untuk masyarakat mengadakan forum tidak terlihat. Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mewadahi masyarakat untuk melakukan diskusi atau musyawarah. Pada saat pengajuan izin oleh N kepada pemerintah desa, seharusnya pemerintah desa langsung mengadakan musyawarah bersama. Hal ini dilakukan agar tidak menyebabkan kesalahpahaman antara masyarakat dengan N. Pemerintah desa memberikan tempat musyawarah hanya pada saat konflik sudah terjadi untuk menyelesaikan konflik bukan untuk mencegah konflik terjadi. Pemerintah desa seharusnya tidak menunggu konflik harus terjadi terlebih dahulu, tetapi peran aktifnya sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik terjadi dengan memberikan tempat untuk menjalin komunikasi antar pihak.